



Judul : Harapan komisi X, pendidik teladan di ruang publik
Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Harapan Komisi X Pendidik Teladan Di Ruang Publik

WAKIL Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyayangkan aksi dosen Universitas Islam Makassar (UIM) Amal Said meludahi kasir swalayan. Peristiwa itu mencederai nilai kemanusiaan sekaligus merusak martabat profesi pendidik yang seharusnya jadi teladan di ruang publik.

Menurut Lalu, tindakan meludahi orang lain bukan sekadar pelanggaran etika personal, tapi juga mencerminkan kegagalan menjaga adab sosial. Perilaku itu tidak bisa ditoleransi dalam situasi apa pun, terlebih dilakukan seorang dosen.

"Sebagai dosen, tindakan itu tidak beradab, merendahkan martabat kemanusiaan, dan sama sekali tidak dapat ditoleransi dalam kehidupan sosial mana pun," tegas Lalu dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Dosen, lanjutnya, bukan hanya bertugas mengajar, tapi juga jadi teladan moral bagi masyarakat luas. Alasan emosi tidak bisa dijadikan pembenaran atas kekerasan verbal maupun simbolik. Justru, pengendalian diri jadi bagian penting dari integritas seorang dosen sekaligus aparatur negara.

Lebih jauh, Lalu mendorong agar penanganan kasus dilakukan secara tegas dan proporsional sesuai aturan, mengingat yang bersangkutan berstatus aparatur sipil negara (ASN). Untuk itu, dia meminta sanksi ditegakkan secara berjenjang.

"Sanksi harus ditegakkan secara tegas dan proporsional sesuai peraturan, mulai dari sanksi disiplin ASN, sanksi etik oleh perguruan tinggi,

hingga permintaan maaf terbuka," jelas legislator asal Dapil NTB II itu.

Dia menekankan, penegakan sanksi bukan semata untuk menghukum individu. Lebih dari itu, langkah itu penting sebagai pembelajaran agar ruang publik dan dunia akademik tetap dijaga dengan sikap beradab.

Kecaman juga disampaikan anggota Komisi II Ujang Bey. Dia mengingatkan, tiap ASN wajib menjaga etika, terutama ketika berada di ruang publik. Dan karena berstatus sebagai dosen ASN, mekanisme sanksi harus mengacu pada aturan kepegawaian negara.

Dia menyerahkan sepenuhnya penjatuhan sanksi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Kita serahkan ke BKN sebagai lembaga yang mengatur kode etik ASN mengenai sanksi apa yang tepat diberikan kepada yang bersangkutan," kata Ujang, Senin (29/12/2025).

Politikus Partai NasDem itu menyayangkan sikap arogan yang ditunjukkan dalam rekaman CCTV yang beredar luas. Peristiwa itu melukai perasaan publik dan mencoreng citra ASN secara umum. Karena itu, seluruh ASN diimbau agar lebih berhati-hati dalam bersikap di tengah era keterbukaan informasi.

"Saya harap di tengah dunia yang serba terbuka sudah seharusnya ASN lebih berhati-hati bersikap di ruang publik. Jangan sampai ada perasaan orang lain yang terluka karena sikap yang ditunjukkan kurang baik," imbuhnya. ■ **PYB**